

Perilaku sosial dan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19 di kota Bontang

Juliansyah Roy

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

Abstrak

Di Kota Bontang (Kalimantan Timur–Indonesia), pemerintah berupaya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak virus corona dengan meminta semua pihak untuk melakukan social distancing. Work From Home (WFH) dan memutuskan untuk membatalkan kegiatan belajar mengajar. Kebijakan ini tentunya akan berdampak pada perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen sosial untuk mengetahui seberapa besar dampak COVID-19 terhadap perubahan perilaku sosial dan ekonomi di Bontang. Hal ini didukung objektivitas melalui survei yang melibatkan 500 unit responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada perubahan perilaku sosial masyarakat, antara lain: 1) responden memahami dan mulai terbiasa dengan kondisi new normal dalam beraktivitas meskipun masih ada harapan kondisi kembali normal segera; 2) responden tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan Protokol Kesehatan meskipun sulit untuk menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari; 3) responden lelah dengan pandemi; 4) Sebagian besar responden setuju dan akan berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19. Sementara itu, perubahan perilaku ekonomi menyimpulkan bahwa dari 500 responden, terdapat 480 responden (96%) yang masih bekerja dan 7 responden (1,4%) working namun dirumahkan sementara, sebanyak 55 responden (31%) dengan peningkatan pengeluaran untuk makanan/minuman siap saji selama pandemi, 85 responden (17%) menurun dan 260 responden tetap (51,8%).

Kata kunci: Covid-19; perilaku; sosial; ekonomi; eksperimental sosial

Social and economic behavior of the community after the Covid-19 pandemic in the city of Bontang

Abstract

In Bontang City (East Kalimantan – Indonesia), the government is trying to make various efforts to reduce the impact of the coronavirus by asking all parties to practice social distancing. Work From Home (WFH) and decided to cancel teaching and learning activities. This policy will certainly have an impact on changes in social and economic behavior of the community, especially in Bontang City. This study uses a social experiment approach to find out how much impact COVID-19 has on social and economic behavior changes in Bontang. This is supported by objectivity through a survey involving 500 respondent units. The results of the study show that the COVID-19 pandemic has had an impact on changes in people's social behavior, including: 1) respondents understand and begin to get used to the new normal conditions in their activities even though there is still hope that conditions will return to normal soon; 2) respondents did not experience difficulties in implementing the Health Protocol even though it was difficult to implement it in their daily activities; 3) respondents are tired of the pandemic; 4) Most respondents agree and will participate in the COVID-19 vaccination program. Meanwhile, changes in economic behavior concluded that out of 500 respondents, there were 480 respondents (96%) who were still working and 7 respondents (1.4%) who were working but were temporarily furloughed, as many as 55 respondents (31%) with an increase in spending on ready-to-eat food/beverages during the pandemic, 85 respondents (17%) decreased and 260 respondents remained (51.8%).

Key words: Covid-19; behaviour; social; economics; Experimental Social

Copyright © 2023 Juliansyah Roy

✉ Corresponding Author

Email Address: juliansyah.roy@feb.unmul.ac.id

PENDAHULUAN

Sejak kemunculannya terdeteksi di Wuhan (China), COVID-19 telah menjadi perhatian publik pada awal 2020. Kematian ribuan orang akibat virus ini menjadikannya pusat perhatian banyak negara. Pandemi ini terbukti telah memberikan hambatan secara global, termasuk di Indonesia (Damanik & Saragih, 2021). Pola perekonomian yang selama ini berjalan selama ini tiba-tiba turun tajam pada konsumsi, distribusi, dan produksi (Mohsin et al., 2021; Wang dkk., 2021). Karena itu, pemerintah Indonesia segera mengambil langkah agresif untuk mengurangi tingkat penyebaran secara maksimal.

Mengingat perlunya refocusing pada APBN Kota Bontang 2021 dengan tujuan program yang mendukung pengendalian, penanganan, pemulihan COVID-19 dan penyelarasan dokumen perencanaan dengan situasi pandemi, maka perlu dilakukan kajian mendalam terhadap sektor-sektor yang terdampak selama pandemi. COVID-19, agar proses perencanaan dan kebijakan refocusing anggaran belanja daerah dalam penanganan covid-19 di Kota Bontang tepat sasaran dan bermanfaat.

Orang tidak dapat makan dan menyediakan kebutuhan hidup lainnya jika mereka terus-menerus dikurung di rumah (Singh et al., 2021). Selain itu, hiper inflasi akibat gejolak ekonomi dapat memperburuk kondisi politik, 'panic buying' dan sosial masyarakat (Indah & Muqsith, 2021). Akibatnya, pada akhirnya mereka akan kehilangan pekerjaan dan terseret ke dalam pengangguran dan semakin dekat dengan kemiskinan (Cooper & Gordon, 2021).

Kontribusi dan urgensi penelitian ini adalah memberikan arahan dan rekomendasi dalam rangka refocusing perencanaan dan penganggaran 2021 secara hati-hati untuk mendukung pengendalian, penanganan, dan pemulihan ekonomi serta reformasi sosial di masa pandemi COVID-19 .

Ruang lingkup penelitian meliputi dua jenis, yaitu pengumpulan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder meliputi informasi kondisi masyarakat Kota Bontang selama pandemi, terutama sebaran dan jumlah kasus terkonfirmasi, kasus aktif, dan kematian. Setelah itu, ada informasi kondisi terkini terkait indikator kesejahteraan, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan, daya beli dan indikator terkait lainnya. Terakhir adalah desk research dengan mengkaji kajian dan dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam rangka menyempurnakan konsep dan analisis (misalnya Snyder, 2019; Bowen, 2009; Xiao & Watson, 2017; Rashid dkk., 2019).

Kedua, pengumpulan data primer melalui progres Focus Group Discussion (FGD) di tingkat Perangkat Daerah, khususnya bagi Perangkat Daerah yang menangani sektor terdampak COVID-19. Perangkat daerah yang terlibat dalam FGD tersebut meliputi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Departemen Koperasi, UKM dan Perdagangan; Departemen Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Kantor tenaga kerja; Departemen Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian; Dinas kesehatan masyarakat; Departemen Perhubungan; Rumah Sakit Taman Husada; Unit Pegawai Negeri Sipil; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Kecamatan Bontang Barat; Distrik Bontang Selatan, Distrik Bontang Utara; PT. Pupuk Kaltim; Badak LNG; dan PT. Indominco Mandiri

Selain itu, wawancara mendalam dilakukan kepada Perangkat/Instansi Daerah terkait untuk mendapatkan informasi program dan target program dalam pencegahan, penanganan, pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di masa pandemi COVID-19, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan. Survei untuk mengetahui sektor-sektor yang terdampak COVID-19 di Kota Bontang. Selanjutnya, peneliti menerapkan analisis data, penyusunan rekomendasi, dan verifikasi.

Ringkasan utama penelitian ini disusun dalam beberapa tahap. Poin pertama menyajikan pendahuluan. Kedua, adalah kajian pustaka. Bagian ketiga mencakup metodologi, dan yang keempat adalah mempresentasikan hasil penelitian. Terakhir, kesimpulan menyoroti implikasi dari temuan, rekomendasi, dan kontribusi di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Covid-19

Pandemi COVID-19 masih berlangsung dan belum menemukan titik henti penyebarannya. Sejauh ini, per 28 Februari 2021, sudah ada 113.315.218 orang di dunia yang terkonfirmasi positif COVID-19,

termasuk 2.517.964 kematian. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 terdeteksi pada 2 Maret 2020. Dan hingga 28 Februari 2021, terdapat 1.334.634 kasus terkonfirmasi positif, termasuk 36.166 kematian (WHO, 2021). Di Kota Bontang sendiri terdapat 5111 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan 83 orang meninggal dunia per update 28 Februari 2021 (Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2020).

Peningkatan jumlah kasus secara merata di seluruh Indonesia berdampak negatif pada berbagai sektor, khususnya perekonomian. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal Maret 2020 memaksa sebagian besar masyarakat untuk membatasi aktivitasnya sehingga dapat mencegah penyebaran virus. Seluruh lini usaha mikro, kecil, dan koperasi terdampak wabah pandemi (Yuhertiana et al., 2022). Penurunan penjualan, penurunan modal, penurunan pesanan, kesulitan bahan baku, dan kredit macet (Tanjung & Purnamadewi, 2021). Ekonomi sempat ambruk dalam sekejap.

Di Indonesia, pemerintah berupaya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak virus corona dengan meminta semua pihak untuk melakukan social distancing seperti Work From Home (WFH) dan memutuskan untuk membatalkan kegiatan perkuliahan dan belajar mengajar (Ayuningtyas et al., 2021). Pemerintah telah mengaktualisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM-SM) sebagai pengganti PPKM yang berlangsung hampir sebulan di Jawa dan Bali. Kebijakan itu berubah setelah Presiden Joko Widodo menilai PPKM tidak efektif menekan lonjakan kasus pandemi. PPKM dan PPKM-SM memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Kebijakan tersebut lebih longgar dibandingkan PPKM untuk beberapa koridor. Namun, bahkan dengan relaksasi kebijakan PPKM-SM, tidak dapat meningkatkan belanja publik untuk merangsang peningkatan ekonomi yang signifikan.

Relaksasi keuangan pemerintah

Pemerintah Pusat telah menyiapkan peraturan atau ketentuan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang 'Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan COVID-19', Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 'Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19', Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 tentang 'Pembangunan Fasilitas Observasi dan Shelter dalam Pemberantasan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau', Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang 'Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Percepatan Penanganan COVID-19', Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang 'Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Percepatan Penanganan COVID-19' dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 'Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat', dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang 'PPKM-SM'.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran atau sentralisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta proses realokasi yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Badan Pusat Statistik RI, 2020). Realokasi APBD dapat dipahami sebagai mekanisme perubahan atau perubahan mengalihkan arah tujuan kebijakan anggaran yang digunakan berdasarkan kebutuhan terkait pola pendanaan dalam kebijakan tersebut.

METODE

Sampel

Kami menerapkan pendekatan studi dengan eksperimen sosial tentang seberapa besar dampak sosial pandemi COVID-19 bagi Kota Bontang (misalnya Roy et al., 2021; Bavel dkk., 2020; Gandasari & Dwidienawati, 2020; Yijo dkk., 2021; Saha dkk. al., 2020). Hal ini mendukung objektivitas melalui survei mendalam kepada pemerintah yang mencakup 500 unit informan, di mana waktu wawancara adalah 3 bulan (Februari-April 2022). Peneliti juga dibantu oleh beberapa kelompok yang tugasnya dibagi menjadi beberapa tahap, seperti observasi, dokumentasi, validasi, dan pengolahan data.

Ukuran sampel adalah 500 sampel, dimana peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Perlu diketahui bahwa teknik ini sangat cocok untuk pengumpulan data lapangan karena peneliti dapat mengetahui dengan pasti target informan yang dituju, misalnya meliputi latar belakang pekerjaan, lapangan, domisili, dan atribut tertentu dengan karakteristik yang tepat dalam menggambarkan hubungan suatu penelitian (Amalia et al., 2020).



Gambar 1.
Fokus dan objektivitas

Kelayakan pola penelitian ini juga ditentukan oleh distribusi ukuran sampel dengan margin of error (margin of error) minimal 1%, sehingga tingkat kepercayaan 99% dapat memproyeksikan kualitas data (Hazra, 2017). Dengan tingkat kesalahan 1%, jumlah minimum sampel adalah 475 (Gujarati, 2012) dan kami mempertimbangkan penggunaan 500 sampel dalam penelitian ini untuk memenuhi kriteria atau sangat memadai. Distribusi distribusi sampel dirangkum pada *Gambar 1*.

Desain dan demarkasi

Alasan logis yang mendasari waktu pelaksanaan dan jumlah sampel cukup terbatas, mengingat situasi dan kondisi selama wabah global ini tidak memungkinkan untuk diterapkan dalam rentang waktu yang lama, sehingga tim peneliti juga harus memperhatikan '5 M' (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sosial), menghindari kerumunan massal, dan mengurangi mobilitas) selama proses wawancara. Fokus penelitian hanya berfokus pada 3 wilayah (Kecamatan), yaitu Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat dengan keterlibatan informan yang bekerja (karyawan swasta, pemerintah, dan pengusaha) dan mereka yang tidak bekerja (sekolah dan pekerja rumah tangga).

Karakteristik respondents

Profil responden disajikan pada *Tabel 1*. Alhasil, mereka yang berada di wilayah studi, tepatnya di Kota Bontang, mewakili masing-masing daerah. Penyebaran kuesioner berdasarkan Kabupaten, ternyata Bontang Utara lebih banyak mengeksplorasi dari 2 daerah lainnya, dimana terdapat 228 sampel atau sekitar 45,6% dan sisanya 54,6% terdiri dari Kabupaten Bontang Selatan (184 sampel) dan Kabupaten Bontang Barat (88 sampel).

Untuk sebaran yang mengacu pada jenis kelamin, dari 500 sampel, 265 responden adalah laki-laki (53%) dan sisanya 47% atau 235 responden perempuan. Ada yang perempuan, 6% lebih sedikit dari mereka yang laki-laki. Hal ini juga memberikan sinyal bahwa pekerja telah merasa, mereka yang tergolong pekerja dan berusia produktif (15-64 tahun) adalah kepala rumah tangga dibandingkan dengan perempuan.

Wawancara dilakukan dengan menargetkan responden dari segala usia yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Yang paling terlihat adalah responden pada kelompok usia 17-25 tahun atau persentasenya mencapai 30,4%, karena interval usia ini adalah mereka yang sedang bersekolah atau sedang mengejar karir. Di satu sisi, dari 500 kuesioner yang dibagikan, hanya 3 responden yang berada pada kelompok usia di bawah 17 tahun (0,6%) dan ini valid atau memenuhi kriteria penelitian, karena berdasarkan tingkat pengetahuan untuk menjawab pertanyaan tim yang diajukan dan latar belakang pendidikan atau pemahaman Responden menentukan arah penelitian ini. Selanjutnya, 26,6% dan 26,8% berada pada kelompok usia 17-25 tahun dan 26-35 tahun dikatakan sebagai 'golden age' seseorang dalam pembangunan peningkatan kesejahteraan.

Kami mewawancarai responden dari segala usia yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Yang paling terlihat adalah responden pada kelompok usia 17-25 tahun atau persentasenya mencapai 30,4%, karena interval usia ini adalah mereka yang sedang bersekolah atau sedang mengejar karir. Di satu sisi,

dari 500 kuesioner yang dibagikan, hanya 3 responden yang berada pada kelompok usia di bawah 17 tahun (0,6%) dan ini valid atau memenuhi kriteria penelitian, karena berdasarkan tingkat pengetahuan untuk menjawab pertanyaan tim yang diajukan dan latar belakang pendidikan atau pemahaman Responden menentukan arah penelitian ini. Selain itu, 26,6% dan 26,8% berada pada kelompok usia 17-25 tahun dan 26-35 tahun dikatakan sebagai 'zaman keemasan' seseorang dalam pembangunan peningkatan kesejahteraan. Setidaknya, responden dominan memiliki pengalaman bekerja dengan lulusan tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 53,4% (267 sampel) dan tidak bersekolah hanya 14 sampel atau 2,8% dari total sebaran 500. Hanya beberapa informan yang mencapai atau mengambil pendidikan master (lulus dari universitas).

Tabel 1 juga mengungkapkan informan berdasarkan status perkawinan, di mana sebagian besar dari mereka sudah menikah atau sekitar 61,8% atau 309 informan. Sedangkan sisanya belum menikah (33,4%), bercerai (3%), dan bercerai (1,8%). Hal ini tentu menjadi beban hidup bagi mereka yang sudah berkeluarga. Selama ini, tampaknya informan yang memiliki keluarga semakin sulit untuk berbagi pendapatan atau pemasukan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, apalagi ada juga yang tidak lagi bekerja atau hanya mengandalkan upah harian.

Tabel 1.
Demografi responden (N = 500)

Aspek	Frekuensi	Untukcentage
Kecamatan		
North Bontang	228	45.6
South Bontang	184	36.8
West Bontang	88	17.6
Jenis kelamin		
Satu	265	53
Perempuan	235	47
Kelompok umur		
<17	3	0.6
17 – 25	152	30.4
26 – 35	133	26.6
36 – 45	134	26.8
46 – 55	49	9.8
> 55	29	5.8
Latar belakang pendidikan		
Tidak di sekolah	14	2.8
SD/MI	24	4.8
SMP/MTS	44	8.8
SMA/SMK/MA	267	53.4
DI/DII/DIII	39	7.8
DIV/S1	107	21.4
S2	5	1
Keadaan		
Menikah	309	61.8
Satu	167	33.4
Cerai	15	3
Perceraian maut	9	1.8

Sebagai informasi tambahan, sejak kemunculannya terdeteksi di China, COVID-19 telah menjadi perhatian publik pada awal 2020. Kematian ribuan orang akibat virus ini menjadikannya pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi ini terbukti memberikan hambatan secara global, termasuk di Indonesia. Pola perekonomian yang selama ini berjalan selama ini tiba-tiba turun tajam pada konsumsi, distribusi, dan produksi (Darma & Darma, 2020). Karena itu, pemerintah segera mengambil langkah agresif untuk menekan jumlah spread maksimum.

Survei yang melibatkan kategori yang cukup penting untuk disampaikan, dengan mempertimbangkan sejauh mana tanggung jawab informan, seberapa besar bebannya, dan langkah atau

strategi apa yang dapat menghadapi lesunya perekonomian di Kota Bontang, bahkan dalam skala nasional maupun global. Wawancara ini telah dilakukan secara terbuka dan mendapat persetujuan resmi dari tim peneliti untuk diberikan izin oleh Pemerintah Kota Bontang .

Kajian dengan teknik survei memiliki konsekuensi yang menjadi tanggung jawab tim peneliti. Memang, sulit untuk mendapatkan data yang ditargetkan. Terlebih lagi, kami menemui kendala yang signifikan, yaitu dalam konteks pencegahan COVID-19. Ada keterbatasan dan kesenjangan waktu untuk pengumpulan data, yang menjadi kendala tersendiri. Untuk itu, demi kelengkapan dan integritas penyajian data juga dilengkapi tim dengan alat perekam dan selama sesi wawancara dapat diterapkan melalui daring (zoom meeting).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respons dan perilaku

Pada bagian ini, terdapat tanggapan berdasarkan persepsi yang diungkapkan oleh responden terhadap pertanyaan yang telah disusun peneliti. Urgensi perilaku responden selama masa COVID-19 hingga saat ini, akan terlihat sejauh mana respon mereka ketika kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diterapkan serta saat kebijakan pemerintah 'new normal' diterapkan yang telah berlangsung cukup lama. Tidak ada referensi, misalnya, dengan menggunakan skala tertentu (misalnya Likert), tetapi tim lebih disesuaikan dengan item yang diarahkan pada setiap pertanyaan. Salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi risiko penularan massal virus menular ini awalnya berdasarkan PSBB yang tertuang dalam dokumen 'Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020' pada 31 Maret 2020 oleh Presiden Indonesia. Setelah itu, karena pertimbangan ekonomi dan faktor kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah, ada sedikit kelonggaran melalui kebijakan 'new normal' yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang 'Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Dinas dan Industri' dalam mendukung keberlangsungan usaha dalam situasi pandemi perlu ada implementasi konkret dengan melibatkan pemerintah di tingkat II (Kabupaten/Kota) untuk bersama-sama memperhatikan protokol kesehatan.

Dari *Tabel 2* dapat dilihat bahwa esensi dari 'era new normal' yang terjadi di Kota Bontang dan bagaimana mereka menyikapinya. Alhasil, sebagian besar informan tentu memahami 'new normal' dan tetap bekerja atau beraktivitas di luar, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan. Bagi yang bekerja di swasta, tentu tidak semua bekerja di luar ruangan, hanya untuk tenaga teknis seperti UPTD atau memang pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan atau menggunakan teknologi. Namun, bagi sebagian pegawai pemerintah yang meja kerjanya berbasis administrasi, tentunya harus menekankan pada pemanfaatan informasi digital, dimana pelayanan birokrasi kepada masyarakat dapat dibantu oleh teknologi yang sengaja dirancang agar tidak bertatap muka. Selain itu, layanan dengan sistem pendukung, tentunya memudahkan dari segi waktu, biaya, dan tenaga, seperti pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga (family card), dan formulir atau hal-hal yang dapat diakses secara online. Hal ini tentu membantu masyarakat dan roda pemerintahan. Hal ini juga mirip dengan skema pembelajaran daring yang menekankan guru dan dosen di sekolah hingga tingkat universitas untuk bersama-sama menggunakan jaringan yang terkoneksi melalui handphone atau komputer yang sudah terkoneksi dengan internet. Ilmi et al. (2020) menjelaskan bahwa di era revolusi industri 4.0, bukan hanya pendidikan yang terbantu, tetapi sektor jasa oleh pemerintah dan perusahaan sangat ditentukan oleh kecanggihan teknologi.

Selama menerapkan 'new normal' atau skema seperti sebelumnya, responden COVID-19 sangat memahami bahwa kondisi dalam beraktivitas perlu diwaspadai dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Mereka yang bekerja di berbagai bidang tentunya harus mematuhi peraturan yang telah dibuat, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Informan juga harus memberikan contoh yang baik bagi penduduk sipil dengan sikap di tempat kerja. Mengacu pada *Tabel 2*, dominan mengatakan 'ya' untuk terus bekerja seperti biasa selama 'new normal'. Namun, 48,4% responden juga selalu tertib dan tetap waspada dengan kebijakan pembatasan jam kerja dan work from home (WFH) atau dapat bertemu dari kantor atau rumah melalui online tergantung pada tingkat intensitas pekerjaan itu sendiri. Jika tidak mendesak, maka peralatan online dapat diterapkan, tetapi jika mendesak dan harus datang ke kantor, mereka juga dapat melaksanakannya melalui '5M' seperti yang dijelaskan pada sesi sebelumnya. Selebihnya, beberapa responden berpikir bahwa kadang-kadang atau sekitar 35,6% berpikir bahwa bagian dari pekerjaan juga dapat dibagi menggunakan sistem yang disediakan oleh kantor. Ada juga

yang mengatakan "tidak" mau mengambil risiko untuk melakukan aktivitas seperti sebelum COVID-19 melanda, karena aspek keselamatan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya menjadi acuan sekaligus skala di Kota Bontang di "zona merah" penularan pandemi ini. Itu semua tergantung pada fenomena dan kebutuhan responden yang mempertimbangkan apakah ketika mereka meninggalkan rumah itu perlu, seperti membeli kebutuhan primer atau hal-hal lain yang mendesak dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.

Tentu saja, semua elemen berharap masa sulit ini akan segera berakhir. Guncangan sejati COVID-19 telah menjadi 'tren' yang tidak dapat dilupakan sampai suatu hari nanti. Meski begitu, 217 responden sangat yakin bahwa situasi ini akan segera berakhir. Ada juga yang berpikir mereka "tidak tahu" kapan epidemi global ini akan berakhir. Sebanyak 283 responden pasrah dan pasrah sepenuhnya pada takdir Tuhan dengan memberikan motivasi dan kepercayaan penuh kepada manusia yang dapat menyelesaikan tantangan ini. Karena bukan tidak mungkin, setiap masalah pasti ada solusinya, sehingga lama kelamaan akan terselesaikan. Memang prediksi terbaru dari WHO (2021) bahwa virus ini akan segera berakhir dalam 2-3 periode, namun itu semua tergantung kebijakan masing-masing negara. Mereka juga yang dapat memantau dan melacak sejauh mana responsnya. Setidaknya, prioritas melalui vaksin kepada orang-orang yang berada di 'garis depan' seperti dunia medis, tentara, polisi, pegawai pemerintah, guru, hingga mereka yang rentan menular, tetap dipertimbangkan. Pencegahan dari segala arah telah diterapkan dan meminimalisir risiko infeksi, sehingga tidak ada lagi korban.

Tabel 2.
Asumsi responden (N = 500)

Jawaban	Frekuensi	Untukcentage
<i>Menuju new normal</i>		
Mengerti	478	95.6
Tidak benar-benar mengerti	22	4.4
<i>Saat new normal</i>		
Ya	248	48.4
Kadang-kadang	178	35.6
Tidak	80	16
<i>Akhir dari pandemi</i>		
Akan berakhir	217	43.4
Tidak tahu	283	56.6
<i>Penggunaan masker</i>		
Ya	460	92
Kadang-kadang	37	7.4
Tidak	3	0.6
<i>Mencuci tangan</i>		
Ya	448	89.6
Kadang-kadang	49	9.8
Tidak	3	0.6
<i>Jaga jarak</i>		
Ya	347	69.4
Kadang-kadang	145	29
Tidak	8	1.6
<i>Jauhi keramaian</i>		
Ya	364	72.8
Kadang-kadang	129	25.8
Tidak	7	1.4
<i>Kurangi perjalanan</i>		

Ya	408	81.6
Kadang-kadang	76	15.2
Tidak	16	3.2
<i>Perasaan tentang pandemi</i>		
Bosan	374	74.8
Kadang-kadang	111	22.2
Tidak jenuh	15	3
<i>Sikap terhadap vaksinasi</i>		
Setuju	323	64.6
Bimbang	148	29.6
Tidak setuju	29	5.8
<i>Kesiapan vaksin</i>		
Bersedia	369	73.8
Tidak mau	131	26.2

Untuk menerapkan salah satu bagian dari perlindungan kesehatan (penggunaan masker), responden cenderung telah mematuhi. Apa yang juga terlihat pada *Tabel 2*, tergambar jelas bahwa jika 460 responden dari 500 sampel di antaranya, ada 92% yang selalu sadar virus ini untuk selalu memakai masker. Sisanya juga 0,6% sisanya yang sengaja tidak menggunakan masker, bukan karena tidak peduli (cuek) dengan pandemi ini, namun ada faktor kesehatan yang menjadi alasannya. Ke-3 orang tersebut juga tidak mau mematuhi perlindungan kesehatan yang ada, karena mereka memiliki riwayat asma (masalah pernapasan) yang jika menggunakan masker hanya sedikit oksigen yang bisa masuk ke paru-paru dan seorang spesialis telah berkonsultasi hal ini. Tentunya akan sangat berbahaya bagi penderita dengan latar belakang penyakit ini jika kandungan oksigen minimum yang dapat dihirup sangat kecil dan akan mengganggu saluran pernapasan yang diaktifkan saat memakai masker (terutama jika berada di ruangan kedap udara atau lembab). Jawaban 'terkadang' juga diberikan oleh 37 responden dengan alasan tergantung situasi dan kondisi. Jika mereka bekerja di ruangan tertentu dengan staf minimal atau WFH, mereka pasti tidak membutuhkan masker karena jika berpidato saat meeting online, maka akan dianggap tidak sopan memakai masker. Selain itu, setelah pulang kerja dan di rumah, mereka tentu tidak memakai masker karena menyesuaikan dengan situasi dan semua responden harus mandi dan segera mencuci pakaian kerjanya untuk mengurangi risiko penularan.

Peran kedua adalah 'mencuci tangan', di mana tingkat kesadaran responden selama ini sangat sadar untuk melakukan itu. Sisanya, ada 52 responden yang berpikir mereka kadang-kadang mencuci tangan dan tidak sama sekali. Ini tidak berarti bahwa 10,4% dari mereka tidak mau mematuhi jaminan kesehatan. Namun, 'terkadang' atau 'tidak' berarti beberapa dari mereka membawa peralatan seperti hand sanitizer (cairan atau semprotan) yang telah mereka siapkan sendiri. Karena fasilitas cuci tangan yang disediakan di kantor, tempat perbelanjaan, pasar, dan lainnya terkadang menimbulkan kerumunan. Orang-orang berdesakan untuk mengantri mencuci tangan di tempat-tempat tertentu. Ada yang kehabisan air bahkan sabun, sehingga hand sanitizer praktis dibawa kemana saja dan kapan saja.

Sorotan ketiga adalah 'menjaga jarak', yang akan menentukan penularan COVID-19. Perlu diketahui, untuk kehidupan sehari-hari, 69,4% responden telah menerapkan protokol dengan menjaga jarak dengan orang lain. Menariknya, terungkap bahwa ada 30,6% yang kadang-kadang menyatakan dan tidak. Ancaman keempat adalah 'jauhi kerumunan'. Kelemahan manusia yang sekaligus tidak lepas dari makna hidup yang sebenarnya adalah 'manusia adalah makhluk sosial'. Bukan berarti buruk atau tidak perlu, tetapi situasinya tidak mendukungnya saat ini, yaitu melakukan komunikasi atau kontak yang erat. Dalam konteks pencegahan, menjauhi kerumunan dianggap sesuatu yang tepat. Sebagai informasi dari tim peneliti di lapangan, setidaknya ada banyak tanggapan yang memahami makna tersebut. Sisanya, 129 responden menyatakan bahwa mereka 'kadang-kadang' tidak menghubungi orang lain dan 1,4% sisanya 'tidak sama sekali' memperhatikan kerumunan yang sangat besar. Hal ini tentu saja sangat sulit untuk diterapkan, karena faktor 'humanis' individu terhadap individu lain merupakan pola dan kebiasaan yang selama ini dijalani umat manusia dalam past.

Kesenjangan lainnya adalah 'mengurangi perjalanan' sangat tepat untuk mencegah penularan pandemi. Catatan khusus, sebagai poin terakhir dalam '5M' dan konsep bahwa respons harus dipraktikkan untuk selalu waspada terhadap bahaya virus ini. Contoh yang dapat menggambarkan fenomena dan tantangan saat ini adalah bagaimana 'mobilitas' seseorang dapat dikurangi, setidaknya. Temuan tim peneliti didasarkan pada eksplorasi, di mana masih ada responden yang 'kadang-kadang' atau bahkan 'tidak' dapat mengurangi mobilitas mereka sama sekali sebagai bagian dari 'makna kemajuan'. Namun, 81,6% berpikir mereka bisa menerapkan konsep kelima ini.

Manusia memiliki perasaan tertentu untuk menggambarkan kondisi psikologis mereka terhadap subjek dan objek tertentu. Pengalaman individu ketika mengalami stres kerja, bosan dengan hal-hal yang dianggap membosankan, dan perlunya perubahan signifikan di lingkungan sekitar dapat menentukan psikologi mereka untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan manusia lain. Romadhoni et al. (2015) dari temuan yang relevan untuk menyiratkan fenomena 'burn out', yang sekarang populer kembali dibahas oleh para peneliti atau ilmuwan, sebenarnya telah dibahas. Adalah wajar bagi karakter individu untuk mengekspresikan apa yang dialami they dalam kehidupan sehari-hari.

Tanggapan informan terhadap hal ini juga menilai perasaan mereka berdasarkan 3 kelompok (jenuh, kadang-kadang, dan tidak). Umumnya, mereka mengungkapkan pandemi COVID-19 yang telah berjalan selama 2 periode ini dengan 'kejenuhan'. Artinya, ada 74,8% responden yang tentunya merasa cemas dengan kondisi yang tidak dapat diketahui dan pasrah dengan bagaimana kelanjutannya. Selain itu, 22,2% beranggapan bahwa 'terkadang' kondisi psikologis ini muncul seketika dan hanya pada waktu-waktu tertentu dan mereka yang menjawab dengan 'tidak jenuh' hanya dipertimbangkan oleh 15 responden karena sudah terbiasa WFH atau sendirian dalam pekerjaan tertentu.

Langkah jitu yang diharapkan dapat mengurangi kecemasan responden adalah kedatangan 'vaksin COVID-19', sehingga tim peneliti memasukkan indikator-indikator ini dan meninjau apakah mereka bersedia dan sejauh mana sikap mereka. Sikap 'menyetujui' vaksin berjudul 'Sinovac' yang dipesan di Inggris pada 2020 silam dan didistribusikan pada waktu atau tahap yang dijadwalkan, dapat meyakinkan 323 responden (64,6%). Menariknya, masih ada 29,6% dari 'undecided' (148 responden) dan 29 responden, atau 5,8% dari mereka yang 'tidak setuju'. Alasan di balik dua jawaban ini adalah karena mereka menunggu giliran beberapa pihak yang sudah divaksin terlebih dahulu, kemudian memutuskan untuk 'menyetujui' vaksin, sehingga keraguan responden bisa berkurang. Ada juga yang tidak setuju, karena informasi yang beredar dari mulut ke mulut dan media sosial mempengaruhi keputusan mereka. Tentu saja, setiap kebijakan pasti memiliki konsekuensinya sendiri. Ada hal-hal yang harus disosialisasikan pemerintah, sehingga membuka wawasan tambahan ke semua elemen.

Dari kesediaan responden untuk vaksin, tidak bisa dipaksakan begitu saja. Setiap penduduk di Indonesia memiliki 'Hak Asasi Manusia' yang sama, serta kewajiban dalam rangka melindungi seluruh bangsa dan tanah air. Selama masa observasi, tim peneliti menyimpulkan bahwa masih ada beberapa yang 'tidak mau', yaitu 131 responden (26,2%) dan sisanya (369 responden) atau 73,8% dari pengamatan terhadap 500 sampel yang merasa siap atau 'bersedia' jika sudah divaksin.

Tekanan ekonomi

Alasan ekonomi tentu menjadi sorotan dan pertimbangan bagi tim peneliti untuk melihat sejauh mana dampak COVID-19 terhadap permasalahan ekonomi masyarakat Kota Bontang dari mikroskop.

Bahkan, tim menemukan beberapa responden menyatakan bahwa 96% masih 'masih bekerja' dan sisanya diklasifikasikan sebagai 'masih bekerja, tetapi untuk sementara masih dirumahkan' (7%), dan 2,6% dari total 500 responden mengira mereka telah dirumahkan oleh kantor atau tempat usaha. Fokus kami, tentu saja, mereka yang bekerja paruh waktu (sementara) atau yang telah diberhentikan. Sebab, masih ada 4% atau 20 responden yang mengalami kesulitan karena penurunan omzet perusahaan (usaha usaha) di sektor tertentu, seperti perdagangan kecil dan menengah dan UMKM (lihat Tabel 3).

Sejak kebijakan 'PSBB' diterapkan, mau tidak mau beberapa kantor atau perusahaan pemerintah sudah mengikuti aturan tersebut. Namun, karena sebagian besar responden bekerja sebagai karyawan swasta, maka tidak memungkinkan untuk melakukan 'Work from Home (WfH)'. Hal ini berbeda dengan fakta bahwa hanya sedikit informan atau sekitar 4,4% dari mereka yang selalu bekerja dari rumah, karena mereka adalah orang-orang yang telah menempati posisi, struktur, atau kelas tertinggi di lembaga atau kantor mereka, sehingga responden seperti ini hanya fokus pada koordinasi dengan bawahan dan mengendalikan kinerja karyawan mereka dari layar. Ada juga 55,6% dari orang yang diwawancarai yang

bekerja seperti biasa dan beberapa menerapkan beberapa untuk pergi ke kantor, membatasi jam kerja, dan bergiliran dengan karyawan lain (shift-work) untuk menerapkan protokol. Ada 200 responden atau 40% dari total jumlah yang tidak mengizinkan 'WfH' karena pekerjaannya yang sangat teknis dan tidak bisa diwakilkan, seperti karyawan PLN, karyawan PDAM, buruh tani, dan pedagang kecil, atau pekerja konstruksi yang hanya mengandalkan upah harian.

Berdasarkan pekerjaan pokok responden, dari 500 di antaranya, dominan berasal dari karyawan swasta yang sudah lama bekerja di perusahaan (49%). Bidang pekerjaan kedua yang paling umum adalah sebagai wirausahawan atau mereka yang bekerja untuk orang lain atau wiraswasta dan dibantu oleh karyawan untuk bekerja dengan upah harian dan bulanan sebesar 15,2%. Di satu sisi, hanya beberapa responden dengan riwayat pekerjaan sebagai dokter/bidan/perawat/apoteker yang sebesar 1,4%. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikitnya tenaga kesehatan di Kota Bontang. Untuk mencegah COVID-19 yang membutuhkan banyak tenaga medis (mengingat jumlah penularan yang semakin meningkat) yang membutuhkan penanganan cepat. Disimpulkan bahwa responden memiliki latar belakang pekerjaan yang cukup beragam, dan ini memberikan sinyal kemampuan kesejahteraan umum atau pendapatan per kapita mereka. Mengacu pada penetapan Upah Minimum (UMK) tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. Sebanyak 3.182.706, sebenarnya mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya, tepatnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.933.099 (Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2020). Dampak ini mempengaruhi respon responden, yang menjelaskan bahwa sebagian besar pendapatan bulanan antara Rp. 2.000.000 – Rp. 3.500.000 atau 175 responden (35%), sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Sementara itu, hanya sedikit dari mereka yang berpenghasilan rendah (<Rp. 500.000), where ada 9,6% atau 48 orang.

Sejauh ini, belum ada dampak nyata COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan responden. Namun, hal ini perlu diwaspadai karena virus global ini kemungkinan akan bertahan lama dan perlahan dapat menurunkan perekonomian semua sektor. Diketahui ada respons informan yang menyatakan 'pendapatan tetap' sebagai bagian dari penyebaran COVID-19, yakni 50,6%. Namun, 45% sisanya, mereka justru beranggapan bahwa pandemi telah mengurangi pendapatan mereka, karena mereka yang ada di sini termasuk dalam kelompok pekerja yang hanya mengandalkan upah/gaji harian.

Alasan kenaikan gaji mereka adalah karena ada insentif khusus untuk tim COVID-19 dan banyak juga yang tidak mematuhi aturan, sehingga ada persepsi dari sebagian orang bahwa sekarang ada 'new normal' dan menganggapnya seperti biasa. Fenomena penurunan pendapatan adalah karena, seperti diketahui di berbagai negara dan wilayah, sejauh ini pekerjaan telah menurun dan sulit untuk mencari pekerjaan. Ada juga penutupan jalan untuk mengurangi penyebaran angka positif COVID-19 dan banyak penjualan yang menurun.

Sementara itu, toko-toko semakin sepi, dan lebih banyak orang memilih untuk tinggal di rumah. Ada juga pendapat bahwa jika memberhentikan mereka, akan sulit untuk mencari pekerjaan. Faktor lainnya adalah semakin banyak masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan, tidak ada komisi, beberapa tunjangan dihapus, UMK tidak bertambah, kerumunan berkurang, takut keluar rumah, banyak kegiatan tidak bisa offline, anak-anak sekolah BDR (bisa datang dari rumah), cuaca tidak mendukung, usaha kebun tutup sementara, jam kerja dan jam kerja dibatasi, jarang datang bekerja, jarang menerima pesanan, orang mencuci diri di rumah, sehingga bisnis laundry sepi, orang tua minim partisipasi untuk membayar administrasi sekolah (padahal pekerjaannya PNS), nyawatock tidak dijual, dan sebagainya.

Dari 22 responden yang mengalami kenaikan pendapatan, paling banyak mengalami kenaikan pendapatan kurang dari 25%, hanya 1 responden yang mengalami kenaikan 75% hingga 100% dan tidak ada responden yang pendapatannya meningkat 100%. Tabel 3 juga menyoroti 225 responden yang mengalami penurunan pendapatan, terbanyak (81 responden) mengalami penurunan pendapatan antara 50% hingga 75%, kemudian 69 responden mengalami penurunan 25% hingga 50% dan terdapat 8 responden yang mengalami penurunan pendapatan 100% atau lebih.

Dari 500 responden, dipastikan bahwa 297 responden (59,4%) telah menerima bantuan sosial dari pemerintah atau perusahaan dan 203 responden (40,6%) belum pernah menerima bantuan. Jenis bantuan yang diterima adalah: bantuan sembako (128 responden), bantuan sosial tunai (21 responden), bantuan langsung tunai (BLT) dari 91 responden, subsidi listrik (13 responden), kartu pra kerja (28 responden), subsidi gaji karyawan (24 responden), BLT usaha mikro dan kecil (26 responden), Corporate Social Responsibility (CSR) 8 responden dari perusahaan seperti PKT dan PLN, dan lainnya ada 17 responden yang sama-sama menerima masker, subsidi PDAM, BPJS employment, vitamin, dan PKH.

Perubahan perilaku konsumen secara umum dalam memaknai COVID-19 ditunjukkan dengan transformasi konsumsi yang semula belanja seperti biasa, kini dilakukan secara online. Karena kebanyakan dari mereka bekerja dan melakukan aktivitas di rumah, tidak ada salahnya untuk sementara waktu mencegah penularan COVID-19, kemudian beralih ke sistem online, termasuk memesan barang dan peralatan atau kebutuhan rumah tangga melalui situs-situs terkemuka seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Dilaporkan ada peningkatan sebesar 18,8% atau 94 responden dari total (500 responden) yang lebih memilih berbelanja online. Namun, bagi yang belum pernah, 25,6% di antaranya memilih berbelanja seperti biasa karena ada kebutuhan khusus dan mendesak, seperti sayur dan sembako yang lebih enak, langsung ke pasar dan pastinya lebih segar daripada online. Selain itu, ada juga yang terus berbelanja seperti waktu normal, sekitar 37,8% responden juga melakukan aktivitas belanja seperti biasa karena menganggap waktu, tenaga, dan biaya lebih efisien dan efektif.

Tabel 3.
Akses ekonomi (N = 500)

Jawaban	Frekuensi	Persentase
		Status pekerjaan
Ya, kerja	480	96
Ya, bekerja tapi sementara di rumah	7	1.4
Tidak, saya hanya dirumahkan karena kantor/tempat usaha ditutup	13	2.6
		WFH
Selalu bekerja dari rumah sejak WFH	22	4.4
Masih ada jadwal untuk masuk kantor	128	25.6
Bekerja seperti biasa	150	30
Tidak mengizinkan WFH	200	40
		Profesi
Dosen dan guru	14	2.8
Pegawai pemerintah, polisi dan tentara	40	8
Trader	15	3
Petani (pekebun)	13	2.6
Nelayan	15	3
Karyawan perusahaan s	245	49
BUMN/BUMD employees	24	4.8
Pegawai kehormatan	9	1.8
Pekerja	25	5
Dokter/bidan/perawat/apoteker	7	1.4
Wiraswasta	76	15.2
Lain	17	3.4
		Pendapatan
<500.000	48	9.6
500.000 - 2.000.000	129	25.8
2.000.000 - 3.500.000	175	35
3.500.000 - 5.000.000	77	15.4
>5.000.000	71	14.2
		Dampak COVID-19 terhadap pendapatan
Tambah	22	4.4
Konstan	253	50
Kurang	225	45
		Persentase peningkatan pendapatan

<25%	12	
25% - <50%	6	
50% - <75%	3	
75% - <100%	1	
≥100%	0	
Persentase penurunan pendapatan		
<25%	47	
25% - <50%	69	
50% - <75%	81	
75% - <100%	20	
≥100%	8	
Status penerima bansos		
Terima	297	59.4
Jangan terima	203	40.6
Aktivitas belanja online		
Tidak pernah	128	25.6
Tambah	94	18.8
Konstan	189	37.8
Kurang	89	17.8
Peningkatan belanja online		
<25%	46	
25% - <50%	26	
50% - <75%	13	
75% - <100%	5	
>100%	4	
Kurangid belanja online		
<25%	49	
25% - <50%	13	
50% - <75%	15	
75% - <100%	11	
>100%	1	
Pengeluaran untuk bahan makanan		
Tambah	167	33.4
Konstan	258	51.6
Kurang	75	15
Pengeluaran untuk makanan/minuman siap saji		
Tambah	155	31.2
Konstan	260	51.8
Kurang	85	17
Pengeluaran untuk kesehatan		
Tambah	276	55.2
Konstan	192	38.4
Kurang	32	6.4
Pengeluaran untuk listrik		
Tambah	157	31.4
Konstan	313	62.6

Kurang	30	6
Biaya pulsa dan paket data		
Tambah	265	53
Konstan	206	41.2
Kurang	29	5.8
Pengeluaran untuk bahan bakar minyak		
Tambah	58	11.6
Konstan	341	68.2
Kurang	101	20.2

Sangat menarik untuk menggambarkan persentase kenaikan dan persentase penurunan belanja online responden dibandingkan dengan waktu normal seperti biasa. Secara spesifik, kurang dari 25% di antaranya (dari 94 responden) mengalami peningkatan dan 46 orang ini merasa memang tidak ada tambahan kuota konsumsi mengingat hal tersebut sejalan dengan pendapatan mereka yang juga tidak bertambah sejak pandemi ini melanda. Serupa dengan peningkatan tersebut, ada juga penurunan belanja online oleh 49 responden (<25%) yang berpikir bahwa intensitas belanja menurunkantingkat kesejahteraan yang dinamis.

Sebanyak 167 responden (33,4%) dengan peningkatan pengeluaran bahan pangan (sembako, sayuran, lauk raw) selama pandemi, 75 responden (15%) menurun dan 258 responden tetap (51,6%).

Dari 500 responden, terdapat 167 responden (33,4%) dengan peningkatan pengeluaran bahan makanan (sembako, sayuran, lauk raw) selama pandemi, 75 responden (15%) menurun dan 258 responden tetap (51,6%). Sementara itu, pengeluaran responden untuk jenis makanan dan minuman siap saji, terdapat 55 responden (31,2%) dengan peningkatan pengeluaran untuk makanan/minuman siap saji selama pandemi, 85 responden (17%) menurun dan 260 responden tetap (51,8%).

Masyarakat juga mengikuti desakan dari Pemerintah untuk menekan penularan COVID-19 melalui kesadaran masing-masing. Sebagai informasi pendukung, dijelaskan bahwa telah terjadi peningkatan drastis pengeluaran di bidang kesehatan, seperti obat-obatan, vitamin, dan sanitasi. Pandemi global telah mempengaruhi perilaku individu, setidaknya untuk diharapkan melalui motif dan tindakan pencegahan dengan peralatan kesehatan rumah tangga.

Selain transformasi belanja di sektor kesehatan, responden juga memiliki kecenderungan untuk meningkatkan belanja listrik. Terlihat adanya tambahan konsumsi listrik sebesar 31,4%. Dari jumlah 500 unit responden, ada juga yang berasumsi bahwa jenis pengeluaran ini tetap (62,6%) dan sisanya justru menurun (6%). Bagi mereka yang bekerja dari rumah, sebenarnya ada tren boros untuk menghabiskan listrik. Bagaimana tidak, bekerja dari rumah juga membutuhkan biaya internet atau paket data untuk ponsel pintar yang tidak kalah dengan sebelum COVID-19.

Pengeluaran dari kredit juga tampaknya meningkat dari waktu ke waktu. Karena ada 265 responden (53%) di antaranya merasa perlu melakukan top up pulsa setiap saat dan koordinasi jarak jauh dengan rekan kerja atau karyawan lebih intensif. Secara otomatis, ini akan mengkonsumsi listrik untuk mengisi lebih banyak. Sisanya, ada 206 responden yang mengatakan tetap dan thdi sana menurun sekitar 5,8%.

Efek pandemi tampaknya tidak berpengaruh signifikan bagi mereka yang tetap melakukan aktivitas seperti bekerja di luar rumah, karena ada 341 responden yang merespon pengeluaran bahan bakar minyak (BBM) secara konstan dan tetap. Sementara itu, 101 responden menilai mengalami penurunan karena mereka yang berada di sini tergolong pekerja yang hanya bekerja dari rumah.

Pilar Lainnya

Untuk transportasi umum, termasuk responden online beralasan tetap sebagai pengguna (75,4%). Alasan COVID-19 tampaknya tidak berpengaruh signifikan pada mereka yang dianggap sebagai penggemar transportasi umum dan online. Hanya sedikit meningkat atau menurun, di mana tim peneliti menemukan bahwa sekitar 24,6% justru semakin intens dan beralih ke transportasi pribadi karena takut bertemu dengan orang banyak dan mengurangi aktivitas di luar ruangan seperti fasilitas umum, tempat perbelanjaan, dan sebagainya yang mengundang kerumunan. massa.

Tabel 4.
Faktor-faktor lain

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Pengeluaran untuk transportasi umum		
Tambah	41	8.2
Konstan	377	75.4
Kurang	82	16.4
Riwayat terinfeksi COVID-19		
Ya	43	8.6
Tidak	457	91.4

Pencarian kami berikutnya adalah bagaimana melihat perspektif responden tentang sejarah COVID-19. Hasilnya, identifikasi di lapangan hanya mengeksplorasi beberapa responden yang mengaku telah terpapar virus menular ini sebanyak 8,6%. Padahal, kejujuran sangat penting sebagai bagian dari keterbukaan informasi untuk mendukung program pemerintah daerah dalam upaya pencegahan infeksi. Mereka yang berpikir tidak sekitar 91,4%, karena belum pernah melakukan tracing melalui swab-test dan rapid antigen secara bertahap. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka tidak pernah terinfeksi berdasarkan hasil medis dan sisanya telah mengikuti rekomendasi pemerintah untuk vaksinasi. Pada Tabel 4 memeriksa mereka yang sudah divaksin, yakni responden yang berada di 'garis depan'. Termasuk di dalamnya berarti mereka dalam pekerjaan sebagai tenaga kesehatan, TNI, Polri, aparat pemerintah, guru, dan dosen.

SIMPULAN

Hal inilah poin terakhir dalam kajian khusus ini, yang berfokus pada temuan beserta apa yang dapat diterapkan Pemerintah Kota Bontang sebagai langkah strategis dalam merespon kondisi sosial ekonomi di tengah musibah ini.

Memang, responden sangat memahami tentang bahaya dan tindakan pencegahan apa yang harus diterapkan, misalnya, dengan '5M' dan vaksinasi. Namun, yang menjadi fokus tim peneliti di lapangan adalah kondisi psikologis yang mengkhawatirkan jika COVID-19 tidak berakhir. Masalah ekonomi mungkin bukan satu-satunya penyebab kekacauan ini, tetapi memulihkan kesejahteraan psikologis individu tentu jauh lebih sulit. Mengingat pandemi global ini sudah berlangsung selama 2,5 tahun di berbagai negara (termasuk Indonesia), bukan tidak mungkin manusia kehilangan akal sehat dan kehabisan kesabaran, sehingga 'new normal' diterapkan tanpa instruksi resmi pemerintah. Tentu saja, ini adalah ancaman terbesar bagi umat manusia, mengingat kerumunan massa adalah biang keladi tingginyapenularan virus.

Selain upaya tambahan yang difokuskan pada pemerintah, pihaknya membuat rekomendasi untuk studi masa depan yang perlu mempertimbangkan ukuran sampel dan target responden. Sebab, tidak semua daerah, baik itu di tingkat nasional maupun skala daerah, memiliki karakteristik yang sama, tetapi studi kasus efek sosial yang berbeda sejak munculnya COVID-19. Ada perhatian khusus dan pemahaman mendalam, juga difokuskan pada penggunaan analisis data techniques, untuk menghasilkan temuan yang bervariasi.

Studi ini juga membuka jalan bagi implikasi teoritis di masa depan dan kontribusi akademis untuk terus menginspirasi, menyoroti, dan menganggap serius gagasan tentang apa yang paling tepat untuk membalikkan efek sosial-ekonomi dari pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S., Lestari, D., & Nurjanana, N. (2020). Perubahan konsumsi rumah tangga selama pandemi COVID-19: empiris dari Kota Samarinda, Indonesia. *Jurnal Internasional Rehabilitasi Psikososial*, 24(3), 5603-5614. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR2021161>
- Ayuningtyas, D., Haq, H. U., Utami, R., & Susilia, S. (2021). Mempertanyakan respons kebijakan publik pemerintah Indonesia terhadap pandemi COVID-19: analisis kotak hitam untuk periode Januari-

- Juli 2020. *Perbatasan dalam Kesehatan Masyarakat*, 9, 612994. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.612994>
- Bavel, J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., Crockett, M. J., Crum, A. J., Douglas, K. M., Druckman, J. N., Drury, J., Dube, O., Ellemers, N., Finkel, E. J., Fowler, J. H., Gelfand, M., Han, S., Haslam, S. A., Jetten, J., Kitayama, S., ... Willer, R. (2020). Menggunakan ilmu sosial dan perilaku untuk mendukung respons pandemi COVID-19. *Perilaku Manusia Alam*, 4(5), 460–471. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z>
- Bowen, G. (2009). Analisis dokumen sebagai metode penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Kualitatif*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Central Bureau of Statistics of Bontang City. (2020). *Kota Bontang dalam angka [Bontang City in numbers]*. Samarinda: Suvi Sejahtera.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. (2020). Analisis Provinsi Kalimantan Timur edisi terbaru 2020 [*Analisis Provinsi Kalimantan Timur edisi terbaru 2020*]. Diambil dari <https://kaltim.bps.go.id/publication/2020/12/28/e919ac148799b217be6dab93/analisis-isu-terkini-provinsi-kalimantan-timur-2020.html>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). Kemiskinan dan ketimpangan [*Kemiskinan dan ketimpangan*]. Diambil dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- Cooper, M. A., & Gordon, J. L. (2021). Memahami panic buying melalui lensa psikodinamik terintegrasi. *Perbatasan dalam Kesehatan Masyarakat*, 9, 666715. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.666715>
- Damanik, D. W., & Saragih, J. (2021). Konseling tentang COVID-19 dan pelaksanaan protokol kesehatan dengan 5M. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 1(1), 15–18. Retrieved from <https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakamitra/article/view/9>
- Darma, S., & Darma, D. C. (2020). Manajemen ketahanan pangan untuk Indonesia: strategi di masa pandemi COVID-19. *Dinamika Manajemen dalam Ekonomi Pengetahuan*, 8(4), 371-381. <https://doi.org/10.2478/mdke-2020-0024>
- Ilimi, Z., Darma, D. C., & Azis, M. (2020). Kemandirian dalam pembelajaran, manajemen pendidikan, dan industri 4.0: habitat indonesia selama COVID-19. *Jurnal Antropologi Olahraga dan Pendidikan Jasmani*, 4(4), 63-66.
- Hazra A. (2017). Menggunakan interval kepercayaan dengan percaya diri. *Jurnal Penyakit Toraks*, 9(10), 4125–4130. <https://doi.org/10.21037/jtd.2017.09.14>
- Indah, A. V., & Muqsith, A. (2021). Panic buying: konsumerisme masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 perspektif psikoanalisis jacques lacan. *Jurnal Filsafat*, 31(1) 24–48. <https://doi.org/10.22146/jf.56722>
- Gandasari, D., & Dwidienawati, D. (2020). Analisis konten isu sosial dan ekonomi di Indonesia selama pandemi COVID-19. *Heliyon*, 6(11), e05599. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05599>
- Gujarati, D. N. (2012). *Ekonometrika dasar*. Noida: Pendidikan Tata McGraw-Hill.
- Mohsin, A., Hongzhen, L., & Hossain, S. F. A. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi konsumen: analisis penanggulangan. *SAGE Terbuka*, 11(2), 1-10. <https://doi.org/10.1177/21582440211008875>
- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Metode studi kasus: panduan langkah demi langkah untuk peneliti bisnis. *Jurnal Internasional Metode Kualitatif*, 18, 1-13. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>
- Romadhoni, L. C., Asmony, T., & Suryatni, M. (2015). Pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, dan dukungan sosial terhadap burnout pustakawan di Kota Mataram. *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal*

Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan, 3(2), 125-145.
<https://doi.org/10.24252/kah.v3i2a3>

- Roy, J., Hasid, Z., Lestari, D., Darma, D. C., & Kurniawan A, E. (2021). COVID-19 maneuver on socio-economic: exploitation using correlation. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 146-162. <https://doi.org/10.21009/JPEB.009.2.6>
- Saha, K., Torous, J., Caine, E. D., & De Choudhury, M. (2020). Efek psikososial dari pandemi COVID-19: studi kuasi-eksperimental skala besar di media sosial. *Jurnal Penelitian Internet Medis*, 22(11), e22600. <https://doi.org/10.2196/22600>
- Singh, G., Aiyub, A. S., Greig, T., Naidu, S., Sewak, A., & Sharma, S. (2021). Mengeksplorasi perilaku panic buying selama pandemi COVID-19: perspektif negara berkembang. *Jurnal Internasional Pasar Negara Berkembang*, Vol. ahead-of-print, No. di depan cetak. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-03-2021-0308>
- Snyder, H. (2019). Tinjauan pustaka sebagai metodologi penelitian: ikhtisar dan pedoman. *Jurnal Penelitian Bisnis*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tanjung, D., & Purnamadewi, Y. L. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap UMK dan koperasi serta pemulihan strategis di era new normal. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 12(3), 220-231. <https://doi.org/10.29244/jmo.v12i3.39197>
- Wang, Z., Zhang, Z., Zhang, Q., Gao, J., & Lin, W. (2021). COVID-19 dan respons pasar keuangan di Tiongkok: bukti mikro dan kemungkinan mekanisme. *PloS Satu*, 16(9), e0256879. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256879>
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2021). *Saran penyakit virus corona (COVID-19) untuk umum*. Diperoleh dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Panduan melakukan kajian pustaka yang sistematis. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Perencanaan*, 39(1), 93-112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yijo, S., Asnawati, A., Darma, S., Achmad, G. N., Arizandi, M. A., Hidayati, T., & Darma, D. C. (2021). Eksperimen sosial tentang masalah dari petani tomat selama COVID-19 - kasus Indonesia. *Jurnal SAR - Sains dan Penelitian*, 4(1), 7-13. <https://doi.org/10.18421/SAR41-02>
- Yuhertiana, I., Zakaria, M., Suhartini, D., & Sukiswo, H. W. (2022). Ketahanan koperasi selama pandemi: Bukti Indonesia dan Malaysia. *Keberlanjutan*, 14(10), 5839. <https://doi.org/10.3390/su14105839>